

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Upah

a. Pengertian Upah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun agar menjaga jangan sampai upah yang diterima terlampaui rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.²

b. Pengertian Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenakerjaan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 159-160.

²Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenakerjaan Indonesia*, 161.

memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Menurut Permen No. 1 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan dan berlaku selama satu tahun berjalan.³

Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan di sini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara

³Danang Sunyoto, *Juklak PHK: Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014), 1-2.

teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja.⁴

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Upah minimum FLSA menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan kepada sejumlah besar karyawan. Upah minimum yang aktual dapat berubah hanya melalui tindakan dari kongres. Tingkat upah minimum yang lebih rendah ditetapkan untuk karyawan yang “menerima tip” seperti dalam perusahaan restoran, tetapi gaji mereka setidaknya harus sama dengan upah minimum ketika rata-rata tip yang diterima juga dimasukkan ke dalam gaji. Tingkatan

⁴Danang Sunyoto, *Juklak PHK: Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja*, 15-16.

di mana upah minimum ditetapkan membutuhkan suatu diskusi politis yang signifikan dan manuver dari badan legislatif. Akan tetapi, sebagaimana diindikasikan dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, beberapa masalah etika tengah diperdebatkan tentang tujuan dari upah minimum tadi dan bagaimana hal tersebut dapat diubah.⁵

c. Mekanisme Proses Penetapan Upah Minimum berdasarkan standar KHL

Beberapa proses mekanisme dalam penetapan upah minimum yang berdasarkan standar kehidupan hidup layak (KHL) adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
- 2) Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 13 tahun 2012, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukansurvey harga untuk menentukan

⁵Robert L. Mathis, John H. Jakson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 133-134.

nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing.

- 3) Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
- 4) Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.⁶ Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha diperusahaan yang bersangkutan.
- 5) Berdasarkan nilai harga survey tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan factor lain: produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling

⁶ Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, "Mekanisme Proses Penetapan Upah Minimum Berdasarkan KHL", <http://www.sumbaprov.go.id/details/news/5769> (diunduh tanggal 21 Februari 2018).

tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/ pertimbangan dari Dewan Pengupahan.

- 6) Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.⁷

d. Tujuan penetapan upah minimum yaitu

Adapun tujuan dari penetapan upah minimum yaitu:

- 1) Sebagai jaring pengaman

Dengan dipenuhinya kebutuhan fisik dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan maka akan menjauhkan pekerja dari perbuatan tercela seperti pencurian dan penggelapan.

- 2) Mengangkat taraf hidup.

Taraf hidup khususnya untuk karyawan tingkat rendah terangkat, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dasar mereka.

⁷Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, “Mekanisme Proses Penetapan Upah Minimum Berdasarkan KHL”, <http://www.sumbaprovo.go.id/details/news/5769> (diunduh tanggal 21 Februari 2018).

3) Pemerataan pendapatan

Pendapatan perusahaan dinikmati oleh pengusaha dalam bentuk laba dan oleh pekerja dalam bentuk gaji dan penerimaan-penerimaan lain.⁸ Besarnya upah dan penerimaan antara karyawan satu berbeda dengan karyawan lain tergantung besarnya sumbangan terhadap perusahaan. Karyawan dengan sumbangan yang tinggi akan mendapatkan gaji dan penerimaan lain dalam jumlah yang besar, dan sebaliknya untuk karyawan dengan sumbangan yang rendah gaji dan penerimaan lainnya juga rendah. Dengan adanya ketentuan upah minimal, maka karyawan yang dinilai sumbangannya kecil, akan mendapatkan sebesar upah minimal tersebut. Tidak boleh kurang dari upah minimal.⁹

e. Kontrak Tenaga Kerja (Ijarah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang

⁸ Sri Haryani, *Hubungan Industrial di Indonesia* (yogyakarta: AMP YKPN, 2002), 144.

⁹ Sri Haryani, *Hubungan Industrial di Indonesia*, 146.

mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajir. Atau dengan kata lain, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.

Syarat sah dan tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

- 1) **Ketentuan kerja**, ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya juga harus ditetapkan. Dari Ibnu Mas'ud berkata:

¹⁰ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 229.

Nabi SAW bersabda: “apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajir, maka hendaknya diberi tahu tentang upahnya”.

- 2) **Bentuk kerja**, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir.
- 3) **Waktu kerja**, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.
- 4) **Gaji kerja**, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bias menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.¹¹

¹¹ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 229.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Said “*Bahwa Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya menjadi jelas bagi ajir tersebut*”. Upah dapat digolongkan menjadi 2:

- 1) Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- 2) Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.¹²

2. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

¹²Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 230.

Artinya, kenaikan harga satu jenis barang tidak termasuk dalam kategori inflasi.¹³ Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu: kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus.

1) Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.

2) Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

3) Berlangsung Terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

¹³Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Serang: Kopsyah Baraka, 2013), 89.

Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulan dan tahunan. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, berarti akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2,5% ($10\% : 4$), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% ($10\% : 12$).¹⁴

Secara umum, inflasi rendah masih dapat diterima, bahkan dalam tingkat tertentu bisa mendorong perkembangan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Karena dari sisi permintaan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat. Turunnya permintaan akan direspon oleh produsen dengan mengurangi jumlah produksi. Pada akhirnya roda perekonomian ikut terpengaruh menjadi melambat dan PDB mengalami penurunan.¹⁵

¹⁴Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: FEUI), 165-166.

¹⁵Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 90.

b. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi; dapatlah inflasi dibagi kedalam tiga kategori, yakni: merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*), serta inflasi tinggi (*hyper inflation*). Sebenarnya pembagian kedalam tiga kategori ini tidak ada patokan/standard yang pasti. Biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.¹⁶

c. Penyebab Inflasi

Inflasi utamanya disebabkan oleh lebih banyaknya uang yang beredar (*demand side*) dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia (*supply side*). Milton Friedman mengatakan, secara umum inflasi dapat terjadi disebabkan oleh tiga hal, yaitu:¹⁷

- 1) Karena jumlah uang yang beredar melebihi dari yang dibutuhkan. Hal ini disebut juga dengan inflasi dari sisi

¹⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 337-338.

¹⁷ Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas* (Jakarta: UI-Press, 2014), 90.

demand, biasa disebut juga dengan istilah *core inflation*, yaitu inflasi karena masalah moneter.

- 2) Karena jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat (*supply*) lebih sedikit atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebut juga dengan inflasi dari sisi *supply*, biasa disebut juga dengan istilah *non-core inflation*, inflasi karena kegagalan (masalah) dibidang produksi dan distribusi barang dan jasa.

Biasanya hal ini dikatakan juga akibat kondisi sector riil dalam menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa di masyarakat tidak optimal. Oleh karena itu penyebabnya bias banyak sekali, misalnya karena bencana alam yang mengakibatkan factor dan proses produksi dan distribusi barang dan jasa terganggu.¹⁸

Bisa juga disebabkan kelangkaan atau kerusakan sarana dan prasarana produksi, maupun transportasi untuk mendistribusikan barang dan jasa, atau hal-hal lain, yang mengakibatkan terganggunya produksi dan distribusi barang

¹⁸Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas* (Jakarta: UI-Press, 2014), 91.

dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berkurangnya pasokan (*supply*) barang dan jasa dari yang seharusnya, atau meningkatnya permintaan (*demand side*), barang dan jasa, melebihi pasokan yang tersedia (*supply side*).

3) Karena dampak dari Kebijakan Fiskal Negara berupa belanja pemerintah terhadap berbagai barang dan jasa di dalam negeri. Bila belanja pemerintah di pasar domestic cukup besar, maka ini akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang juga besar. Bila volume permintaan melebihi penawaran barang dan jasa, maka harga barang dan jasa akan terdorong meningkat.

d. Dampak Inflasi Pada Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum inflasi mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun, karena inflasi menyebabkan secara umum harga barang dan jasa meningkat. Berbagai dampak atau akibat inflasi pada kesejahteraan masyarakat, secara lebih rinci diantaranya yaitu:

- 1) Dampak Positif: *Memotivasi produsen untuk menambah produksi, sehingga mendorong penambahan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran.*
- 2) Dampak Negatif: *Mendorong spekulasi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat akan uang (daya beli), sehingga mendorong masyarakat enggan menabung, tetapi mengamankan daya beli uangnya, melalui investasi pada logam mulia, atau asset lainnya.*

Adapun kelompok masyarakat yang dirugikan oleh inflasi yaitu:

- 1) Para konsumen, karena harus membayar lebih mahal sehingga barang yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi.
- 2) Masyarakat yang berpenghasilan tetap, karena dengan penghasilan tetap, naiknya harga barang-barang dan jasa, mengakibatkan jumlah barang-barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit, sehingga pendapatan

riil/nyata berkurang, sedangkan kenaikan penghasilan atau pendapatan pada saat terjadi inflasi sulit diharapkan.¹⁹

- 3) Masyarakat pemborong atau kontraktor, karena harus mengeluarkan tambahan biaya agar dapat menutup pengeluaran yang diakibatkan inflasi dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan.
- 4) Masyarakat pemberi pinjaman/kreditor, karena nilai riil dari pinjaman yang telah diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi.
- 5) Masyarakat penabung, karena pada saat inflasi bunga yang diperoleh dari tabungan dirasakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga yang terjadi. Disamping itu akibat naiknya harga barang-barang dan jasa, maka daya beli uang yang ditabung menjadi lebih rendah/turun, jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi.²⁰

¹⁹Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas*, 93.

²⁰Henry Faizal Noor, *Ada Apa Dengan Uang Kertas*, 94.

e. Dampak Inflasi Terhadap Pendapatan

Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi (kondisi inflasi lunak), inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit.²¹

f. Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara teori inflasi tidak dapat dihapus dan dihentikan. Namun, laju inflasi dapat ditekan sedemikian rupa. Islam sebetulnya punya solusi menekan laju inflasi, seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang menyatakan bahwa, pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan stabilitas nilai uang. Dalam hal ini, Al-Ghazali membolehkan

²¹Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 178.

penggunaan uang yang bukan berasal dari logam mulia, seperti dinar dan dirham dengan mencetak fulus, tetapi dengan syarat perintah wajib stabilitas nilai tukarnya dan pemerintah memastikan tidak ada spekulasi dalam bentuk perdagangan uang.²²

Ekonomi islam merupakan ikhtiar pencarian system ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat system kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya, ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari system ekonomi yang ada saat ini menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya. Dan dalam ekonomi islam, hal yang demikian itu insya Allah tidak akan terjadi.

²²Rozalinda, *Ekonomi Islam-teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 312.

Dalam islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh islam. Adhiwarman Karim mengatakan bahwa, Syekh An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika islam melarang praktek penimbunan harta, islam hanya menghususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.

- 1) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.
- 2) Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
- 3) Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak,

- 4) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.²³

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum perang Hunain. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi kedalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan *khulafaur rasyidin*, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi akibat kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk,

²³Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 189.

pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-Maqrizi mengatakan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja.²⁴

g. Solusi Inflasi Prespektif Ekonomi Islam

Secara teori, inflasi tidak dapat dihapus dan dihentikan. Namun, laju inflasi dapat ditekan sedemikian rupa. Islam sebetulnya punya solusi menekan laju inflasi, seperti yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik. Misalnya, Al-Ghazali menyatakan, pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan stabilitas nilai uang. Dalam hal ini, Al-Ghazali membolehkan penggunaan uang yang bukan berasal dari logam mulia, seperti dinar dan dirham dengan mencetak fulus, tetapi dengan syarat pemerintah wajib menjaga stabilitas nilai tukarnya dan

²⁴Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 190.

pemerintah memastikan tidak ada spekulasi dalam bentuk perdagangan uang.

Ibnu Taimiyah juga mempunyai solusi terhadap inflasi. Ia sangat menentang keras terhadap terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan uang yang berlebihan. Ia berpendapat, pemerintah seharusnya mencetak uang harus sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat dan tidak memunculkan kezaliman terhadap mereka. Ini berarti Ibnu Taimiyah menekankan bahwa percetakan uang harus seimbang dengan transaksi pada sector riil. Sebaiknya uang dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Kemudian pecahannya mempunyai nilai nominal yang kecil. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa nilai intrinsik (nilai bahan yang digunakan untuk pembuatan uang) mata uang harus sesuai dengan daya beli masyarakat. Uang terbuat dari berbagai bahan, misalnya dinar (terbuat dari emas) dinar (perak), fulus dari tembaga atau kertas seperti yang ada zaman sekarang. Pada masa ini nilai *intrinsik* uang jauh lebih rendah dari nilai nominal uang

itu sendiri. Penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya akan menyebabkan penurunan nilai mata uang serta akan memunculkan inflasi. Ini berarti akibat dari rendahnya nilai intrinsik uang menjadi salah satu terjadinya inflasi. Begitu juga pemalsuan mata uang dan perdagangan mata uang yang dinilai Ibn Taimiyah sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum.²⁵

Husain Shahathah menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi inflasi sebagai berikut :

- 1) Reformasi terhadap system moneter yang ada sekarang dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi.
- 2) Mengerahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dalam belanja yang tidak bermanfaat.
- 3) Larangan menyimpan (menimbun) harta dan mendorong untuk menginvestasikannya.

²⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 312.

- 4) Meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara materil dan moral.

Dalam perekonomian sekarang, bank sentral mempunyai peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu Negara umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar uang dan mata uang domestik. Saat ini pola *inflation targeting* banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia termasuk Indonesia.²⁶

3. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah menurut Poewadarminta, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individual, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial

²⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 313.

yang lain. Menurut Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun Kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedman bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis sosialnya.²⁷

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Di samping itu pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka. Oleh karena itu, kemiskinan dapat

²⁷Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.

disebabkan karena sifat alamiah/cultural, yaitu masalah yang muncul dimasyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, prodduktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Di samping itu, kemiskina bisa disebabkan oleh masalah struktural, yaitu yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

Menurut Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.²⁸

Menurut Chambers dalam Nasikun, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

²⁸Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklafikasi Orang Miskin* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), 2.

1) Kemiskinan absolut

Bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3) Kemiskinan kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4) Kemiskinan struktural

Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.²⁹

b. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi social yang bermakna akses di ruang public dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin yaitu:

- 1) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Tidak mampu berusaha karena sakit.
- 3) Tidak mampu berfungsi sosial.
- 4) Rendahnya sumberdaya masnusia.

²⁹Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklafikasi Orang Miski*, 3.

- 5) Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa.
- 6) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 7) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain).
- 8) Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.³⁰

c. Kemiskinan Dalam Konsep Islam

Perhatian agama Islam terhadap masalah kemiskinan tersebut sangat besar. Hal ini bias kita lihat dalam Al-Qur'an di mana kata miskin dan *masakin* disebut sampai 25 kali, sementara fakir dan *fuqoro* sampai 14 kali. Allah Swt. Berfirman: "*berikanlah makan kepada orang yang sengsara lagi fakir*" (QS. Al-Hajj, 22: 28).

Nabi Muhammad Saw. sendiri berdoa "aku berlindung kepada-Mu dan kefakiran dan kekufuran." (HR. abu Daud). Mengapa demikian hasis lain menyebutkan bahwa kefakiran

³⁰Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 4.

yang menimpa seseorang atau suatu bangsa cenderung akan berperilaku kufur (*Kadal Faqru An Yakuuna Kufran*). Kufur di sini tidak hanya lawan dari iman, melainkan juga lawan dari syukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah Swt. Menurut Yusuf Al-Qadrawi 1, akibat negative dari kefakiran dan kemiskinan itu bias merusak akidah, moral, dan retaknya keluarga serta masyarakat dan negara.³¹

Dalam Islam ada dua Mazhab dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut miskin ini. *Pertama*, mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat miskin itu adalah “orang yang tidak mempunyai sesuatu pun juga”. *Kedua*, mazhab Hambali dan Syafii yang menyatakan miskin itu adalah “orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi”.³²

B. Hubungan Antar Variabel

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan para pekerja. Upah minimum

³¹Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 159.

³²Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 160.

adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan.

Inflasi merupakan suatu kondisi terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Maksud dari kenaikan harga adalah bahwa harga barang dan jasa saat ini lebih mahal dari harga sebelumnya. Pada tingkat tertentu, inflasi dapat menjadi permasalahan yang serius bagi suatu Negara. Akan tetapi, sampai tingkat tertentu inflasi juga dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memicu produsen untuk meningkatkan outputnya. Lain halnya, ketika inflasi tinggi maka dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena secara riil pendapatan yang diperoleh masyarakat juga menurun, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap.

Inflasi juga merupakan salah satu factor penyebab kemiskinan. Dengan terjadinya inflasi maka segala kebutuhan

masyarakat akan meningkat. Masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi karena terjadi inflasi yang tinggi dan upah yang tetap akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga akan sehingga akan menimbulkan kemiskinan.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rini Susilawati, <i>Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di</i>	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah variabel bebas (X1) yang akan penulis teliti yaitu: Upah Minimum. Sedangkan untuk	Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan dengan penyerapan tenaga kerja. Dan penyerapan

	<i>Provinsi di Indonesia, 2012.</i>	perbedaan dari penelitian ini adalah variabel terikat (Y1 dan Y2). Yang mana Y1 adalah penyerapan tenaga kerja dan Y2 kesejahteraan masyarakat. Perbedaan lainnya adalah waktu dan lokasi penelitian.	tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2.	Sri Kuncoro, <i>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah	Dari hasil analisis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan

	<p><i>Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011, 2014</i></p>	<p>kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pendidikan. Adapun perbedaan lainnya adalah waktu dan lokasi penelitian.</p>	<p>signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dengan nilai koefisien sebesar -0,871315. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan nilai koefisien sebesar -0,165560. Dan pendidikan yang</p>
--	--	---	--

			diproksi dengan angka melek huruf (AMH) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar -0,687686.
3.	Adit Agus Prastyo, <i>Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota</i>	Perbedaan dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Adapun perbedaan	Adjusted R^2 cukup tinggi yaitu 0.982677. sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah

	<i>di Jawa Tengah,</i> 2010	lainnya adalah waktu dan lokasi penelitian.	minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.
--	--------------------------------	---	--

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variable-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.³³ Adapun hipotesis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

³³Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2013), 59.

- H_o^1 : Upah minimum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.
- H_a^1 : Upah minimum secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.
- H_o^2 : Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.
- H_a^2 : Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.
- H_o^3 : Upah minimum dan Inflasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.
- H_a^3 : Upah minimum dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap kemiskina di Provinsi Banten.